



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

**DATA**  
MENCERDASKAN BANGSA

**2017**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta-10710  
Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021)3857046  
Homepage: <http://www.bps.go.id> Email : [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)



**BADAN PUSAT STATISTIK**

---

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

2017





## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama BPS sebagai unit kerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target di lingkup Sekretariat Utama yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Sekretariat Utama BPS.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017, perkembangan capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap periode Renstra sebelumnya, capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap target Renstra Sekretariat Utama BPS 2015-2019, serta penyerapan anggaran Sekretariat Utama BPS 2016. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Sekretariat Utama BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa mendatang sangat kami hargai.

Jakarta, 28 Februari 2018

**BADAN PUSAT STATISTIK**

Sekretaris Utama,



Adi Lumaksono



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I      Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1      Latar Belakang .....	3
1.2      Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	4
1.3      Landasan Hukum .....	6
1.4      Sumber Daya Manusia .....	7
1.5      Harapan dan Tantangan .....	9
<b>BAB II      Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja .....</b>	<b>11</b>
2.1      Rencana Strategis 2015-2019 .....	13
2.2      Indikator Kinerja Utama .....	17
2.3      Anggaran Tahun 2017 .....	20
2.4      Penetapan Kinerja Tahun 2017 .....	20
<b>Bab III     Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>23</b>
3.1      Capaian Kinerja Tahun 2017 .....	25
3.2      Capaian Kinerja Tahun 2017 terhadap Renstra 2015-2019 .....	36
3.4      Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017 .....	40
<b>Bab IV     Penutup .....</b>	<b>43</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>47</b>



## Daftar Tabel

### Tabel

1	Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretaris Utama.....	18
2	Pagu Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2017 (000 Rupiah) .....	20
3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2017 .....	21
4	Rata-rata Capaian Kinerja Sestama Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2017 .....	25
5	Capaian Kinerja Tujuan Pertama Sekretariat Utama: Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel Tahun 2017 .....	27
6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sestama BPS Tahun 2017 dengan Target Renstra Tahun 2016 dan 2019 .....	37
7	Realisasi Pagu Sekretariat Utama menurut jenis Belanja TA 2017 (Miliar Rupiah) .....	40
8	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2017 (Miliar Rupiah) .....	41



## Daftar Gambar

### Gambar

1	Struktur Organisasi Sekretariat Utama .....	6
2	Proporsi Pegawai menurut Unit Kerja .....	8
3	Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan .....	8
4	Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS 2015- 2019 .....	14
5	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .....	15
6	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2012 – 2017 .....	26
7	Predikat Akuntabilitas Keuangan BPS Tahun 2012-2016 .....	30



## Daftar Lampiran

### Lampiran

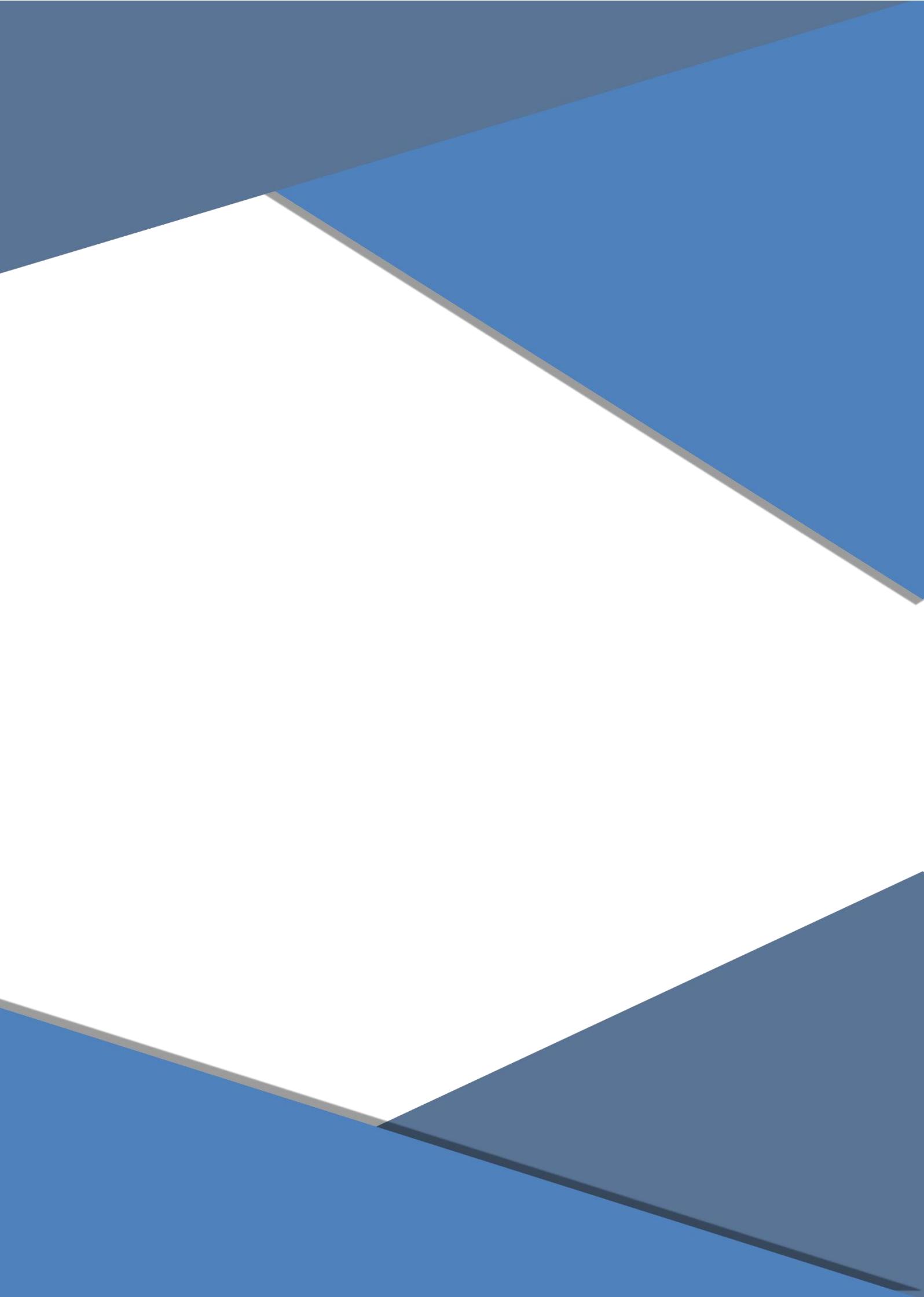
1	Rencana Strategis Sekretariat Utama BPS Tahun 2015-2019 .....	49
2	Pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2017 .....	53
3	Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2017 .....	57
4	Jumlah Pejabat Fungsional pada Badan Pusat Statistik Keadaan: Akhir Tahun 2017 .....	61
5	Jumlah Pegawai BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2017 .....	63
6	Sumber Daya Manusia Sekretariat Utama BPS Menurut Jenjang Pendidikan .....	65



The background features a white central area surrounded by blue geometric shapes. A dark blue triangle is in the top-left corner, a medium blue triangle is in the top-right, a dark blue triangle is in the bottom-left, and a medium blue triangle is in the bottom-right. The text is centered in the white area.

# BAB I

## PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas yaitu lengkap, akurat, mutakhir (*up to date*), berkelanjutan, dan relevan dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, terutama dalam hal pelayanan data dan informasi statistik, BPS dituntut untuk terus memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Hal ini tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis statistik, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, serta dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Di dalam ruang lingkup BPS, Sekretariat Utama (Sestama) merupakan unit kerja eselon I BPS yang melaksanakan kegiatan BPS bersifat non teknis (administratif), seperti kegiatan perencanaan dan penganggaran, kegiatan administrasi terkait pengelolaan keuangan, kegiatan terkait pengembangan sumber daya manusia, kegiatan terkait sosialisasi kegiatan statistik BPS (kehumasan), dan sebagainya. Dengan kata lain, keberadaan unit kerja Sekretariat Utama sangat menunjang keberhasilan kegiatan teknis statistik BPS.

Fungsi Sekretariat Utama BPS dijalankan melalui dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). Adapun aktivitas Sekretariat Utama BPS antara lain Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPS, Penataan Administrasi Keuangan, Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, Sosialisasi Kegiatan BPS 2017, Pengelolaan BMN BPS, Diklat Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional, dan Penyelenggaraan Program D-IV.

Untuk mengukur keberhasilan Sekretariat Utama BPS dalam pencapaian kegiatan tahun 2017, maka pada awal tahun telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2017. Target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS 2017. Sedangkan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BPS 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja selama setahun. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama BPS periode 2015-2019, sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

## **1.2 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Utama BPS berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

### **a. Tugas**

Sekretariat Utama BPS mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama BPS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
- 2) Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPS;
- 3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS;
- 4) Pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPS;
- 5) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.

**c. Susunan Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, adapun susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama BPS yaitu:

**1) Biro Bina Program**

Biro Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik.

**2) Biro Keuangan**

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.

**3) Biro kepegawaian**

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, dan jabatan fungsional.

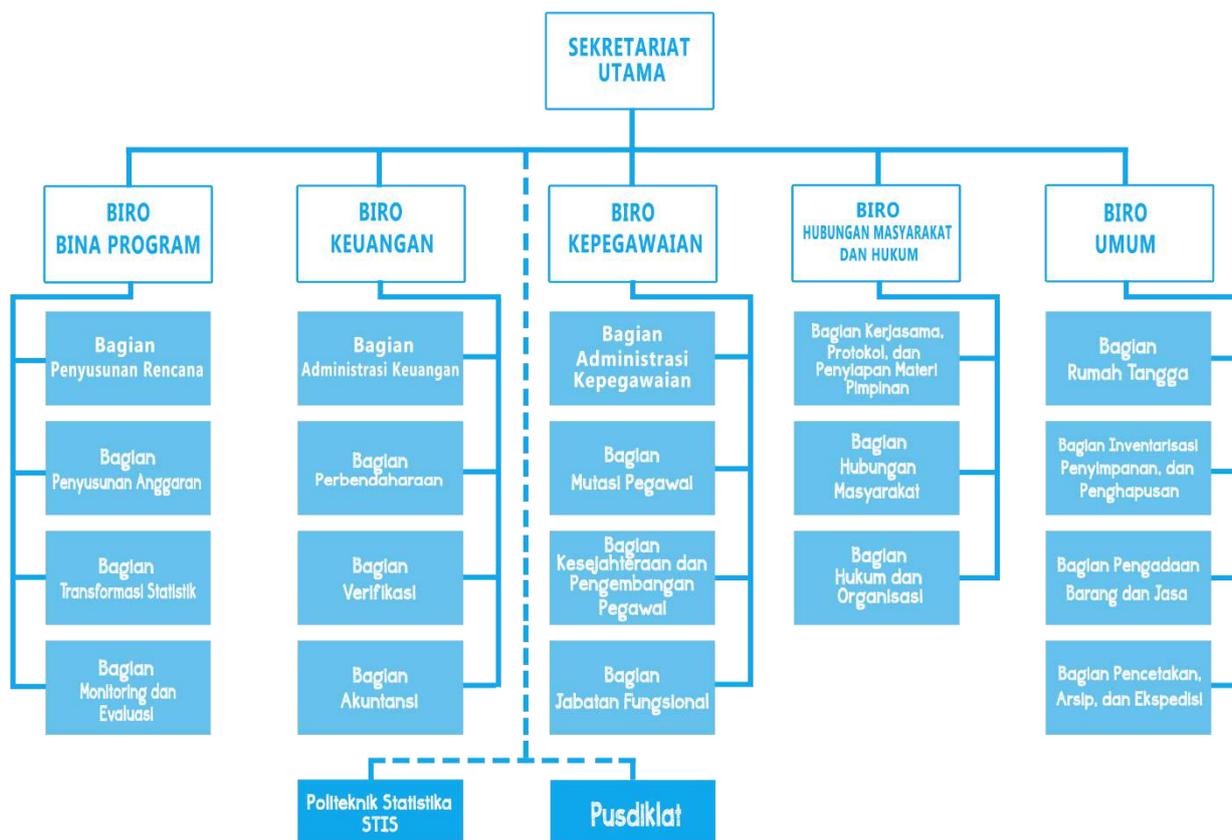
**4) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum**

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.

**5) Biro Umum**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, layanan pengadaan, arsip, ekspedisi, dan penggandaan.

Struktur organisasi Sekretariat Utama BPS secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama**

### 1.3 Landasan Hukum

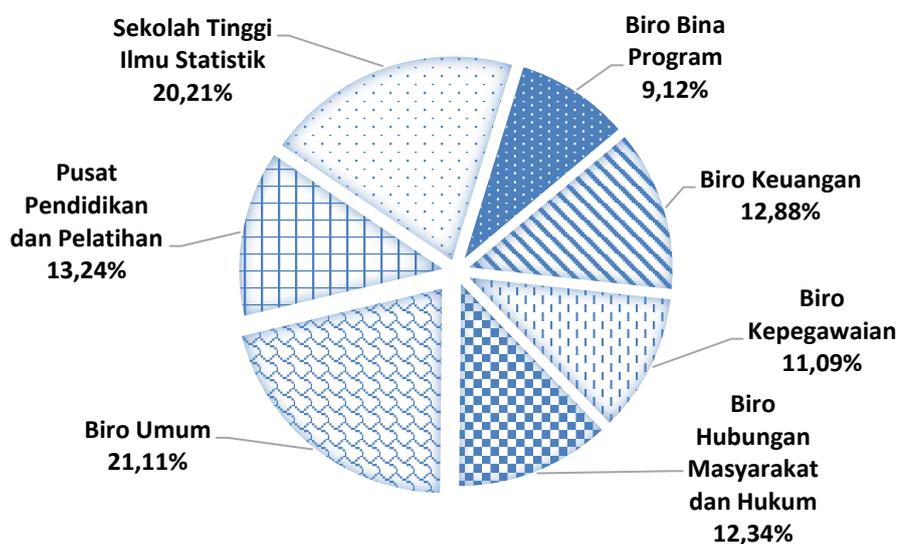
Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama BPS dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Sttaistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- 5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Sttaistik Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.

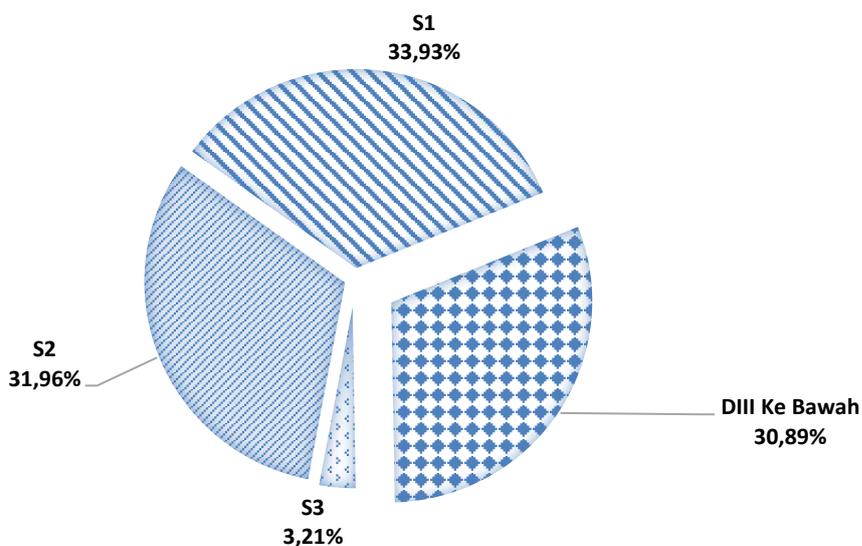
#### **1.4 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Dengan kata lain, sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Tentunya sumber daya manusia dengan kualitas dan kapabilitas yang baik yang diharapkan suatu organisasi. Tahun 2016, jumlah pegawai di lingkup Sekretariat Utama BPS yaitu sebanyak 590 orang, dengan komposisi untuk masing-masing unit kerja sebagai berikut:



**Gambar 2. Proporsi Pegawai menurut Unit Kerja**

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa alokasi pegawai terbanyak ada pada unit kerja Biro Umum dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dengan persentase masing-masing 21,11% (118 orang) dan 20,21% (113 orang). Hal ini sesuai dengan kebutuhan pegawai untuk menangani pekerjaan pada unit kerja masing-masing. Sementara itu komposisi Pegawai di Sekretariat Utama menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.



**Gambar 3. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

Secara umum jika dilihat menurut tingkat pendidikan maka jumlah terbesar adalah pegawai dengan pendidikan S1 yaitu sebanyak 190 pegawai (33,93 persen). Selanjutnya pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 179 orang (31,96 persen) dan DIII ke bawah jumlahnya 173 orang (30,89 persen). Terakhir, pegawai dengan pendidikan S3 sebanyak 18 pegawai (3,21 persen). Informasi lebih lengkap tentang jumlah pegawai di lingkungan Sestama menurut pendidikan dapat dilihat pada lampiran 6.

### 1.5 Harapan dan Tantangan

Menjawab harapan dan tuntutan terhadap pelayanan prima di Bidang Administrasi menjadi tantangan untuk meningkatkan peran Sekretariat Utama BPS sebagai unit organisasi yang melayani dan menjalankan tugas di bidang administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang teknis. Tantangan perubahan yang dihadapi Sekretariat Utama BPS antara lain:

1. Tuntutan pemerintah agar Kementerian/Lembaga memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*, yang bisa dilakukan antara lain:
  - Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan BPS.
  - Peningkatan perencanaan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan yang direncanakan dan tepat guna.
2. Amanat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, yang menyatakan bahwa fungsi Sekretariat Utama adalah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, sinkronisasi, integrasi, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Hal ini bisa dilakukan antara lain:

- Peningkatan koordinasi antar unit di bawah lingkungan Sekretariat Utama BPS dalam penyelenggaraan administrasi pendukung kegiatan statistik yang saat ini masih belum optimal.
- Peningkatan mutu Politeknik Statistika STIS agar tenaga statistik profesional yang dihasilkan mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju.
- Peningkatan mutu penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM aparatur BPS maupun instansi pemerintah.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang layak termasuk Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk seluruh satker BPS secara bertahap dan berdasarkan prioritas.
- Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan dan RB) dalam melakukan penataan kelembagaan BPS.
- Peningkatan kerjasama dengan Kantor Statistik Negara lain sebagai upaya pembenahan bisnis proses kelembagaan efektif dan efisien yang mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang menjadi standar yang dianut oleh kantor statistik di dunia.



BAB II  
RENCANA STRATEGIS  
&  
PENETAPAN KINERJA



## BAB II

# RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis 2015-2019 Sekretariat Utama BPS

Sekretariat Utama BPS, dalam melakukan tugasnya selama lima tahun kedepan, telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BPS tahun 2015-2019 yang tentunya mengacu pada Renstra BPS Tahun 2015-2019. Renstra Sekretariat Utama BPS 2015-2019 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Utama BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BPS tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

#### a. Visi

Sekretariat Utama BPS mempunyai visi yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Administrasi yang efektif, efisien, terpadu, dan berkualitas”.

#### b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka Sekretariat Utama BPS menentukan misi yaitu:

- 1) Menyediakan informasi dan layanan administrasi yang prima, berkualitas, efektif dan efisien bagi pemanfaat layanan dan *stakeholder*;
- 2) Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan administrasi dalam kerangka pelaporan yang andal, efektif, dan efisien; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan sistem administrasi yang berlaku.

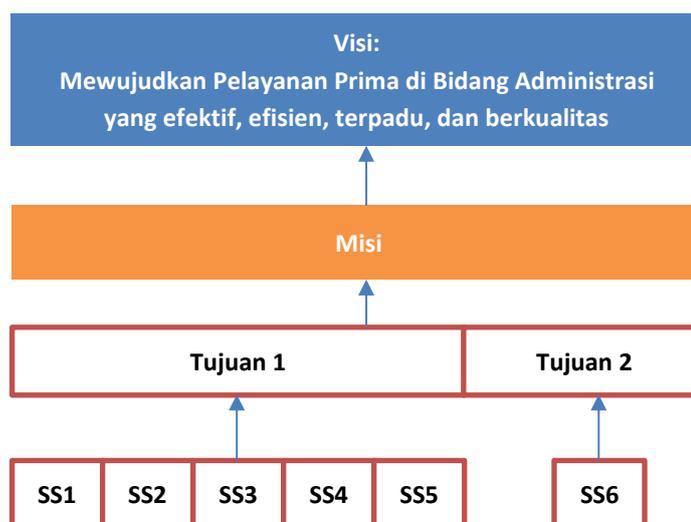
### c. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS

Sekretariat Utama BPS mempunyai tiga tujuan yang dicanangkan dalam Renstra Sekretariat Utama BPS periode 2015-2019. Tujuan Sekretariat Utama BPS tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar 4.



**Gambar 4. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS 2015-2019**

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauhmana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS dapat terlihat pada gambar 5.



Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

#### d. Peta Strategi Sekretariat Utama BPS

Tujuh sasaran strategis Sekretariat Utama BPS memiliki keterkaitan dan kemampuan saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BPS tahun 2015-2019. Guna mengkomunikasikan sasaran strategis tersebut kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Utama BPS, maka disusunlah peta strategi dengan menggunakan 4 perspektif dalam *Balanced Scorecard*, yaitu:

- Perspektif *Customer*

Merupakan perspektif yang berorientasi pada peminfaat atas layanan yang dihasilkan oleh Sekretariat Utama BPS.

- Perspektif *Stakeholder*

Penentuan perspektif ini yaitu mengidentifikasi siapa yang merupakan *stakeholder* organisasi dan menentukan kepentingan khusus apa yang kira-kira dimiliki para *stakeholder*. Selain itu perlu memperhatikan kedudukan masing-masing *stakeholder* terhadap keputusan dan tindakan institusi serta bagaimana mengelola hubungan yang baik dengan *stakeholder* tersebut. Mengingat *stakeholder* Sekretariat Utama BPS dibagi 2 (dua) yaitu *stakeholder internal (subject matter)* dan *stakeholder eksternal* (Bappenas, Kemenkeu, Kemenpan dan RB, dll).

- Perspektif *Internal Business Process*

Merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan untuk menciptakan produk/jasa dalam rangka memenuhi harapan pemanfaat layanan dan *stakeholder* atas produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh Sekretariat Utama BPS.

- Perspektif *Learning and Growth*

Merupakan perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

**e. Kebijakan Sekretariat Utama BPS**

Arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama BPS mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di bidang administrasi serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada berbagai kegiatan administrasi;
2. Mengembangkan sistem administrasi terpadu secara bertahap untuk mendukung kelancaran tugas administrasi;
3. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima;
4. Melaksanakan suatu upaya untuk mentransformasi statistik dalam suatu program yang disebut *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS).

**f. Program yang Dilaksanakan oleh Sekretariat Utama BPS**

Program yang dijalankan oleh Sekretariat Utama ada 2 (dua) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Program DMPTTL BPS

bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi pegawai. Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama BPS. Kedua program generik ini juga dilakukan di lingkungan BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Sekretariat Utama BPS telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik yaitu sebagai berikut:

IKU yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam IKU pada tingkat unit kerja Eselon II. Karena itu setiap unit kerja Eselon II mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Sestama. Peranan unit kerja Eselon II di lingkungan Sestama pada setiap penyusunan target indikator Sestama dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretaris Utama

Tujuan/Sasaran/Indikator	Biro Bina Program	Biro Keuangan	Biro Kepegawaian	Biro Humas dan Hukum	Biro Umum	Pusdiklat	Politeknik Statistika STIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Tujuan 1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</b>							
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*	*					
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	*						
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	*	*	*	*	*	*	*
Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan							
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*	*					
Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif							
Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi				*			
Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.				*			
Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik							
Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga			*				
Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu							*
Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik						*	

Tujuan/Sasaran/Indikator		Biro Bina Program	Biro Keuangan	Biro Kepegawalan	Biro Humas dan Hukum	Biro Umum	Pusdiklat	Politeknik Statistika STIS
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Pegawai Yang Memenuhi Standar Kompetensi Tertentu							
	Persentase Kementrian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer							
	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementrian/Lembaga							
Meningkatnya Layanan Perkantoran								
	Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan					*		
Tujuan 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana BPS								
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS					*		
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS								
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS					*		
	Kepuasan Pegawai Terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS							
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan					*		

### 2.3. Anggaran Tahun 2017

Dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 532,59 miliar. Pagu tersebut dibagi kedalam dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp 476,60 miliar, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) sebesar Rp 55,98 miliar. Secara khusus pada program DMPTTL terdapat pagu dengan sumber dana berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 27,37 miliar dan Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp 5,38 miliar, yang penggunaannya diperuntukan bagi Program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP CERDAS)*.

**Tabel 2. Pagu Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2017 (000 Rupiah)**

Program / Sumber Dana	Hibah Langsung Dalam Negeri	Hibah Langsung Luar Negeri	Pinjaman Luar Negeri	Penerimaan Non Pajak	Rupiah Murni	Rupiah Murni Pendamping	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 DMPTTL	-	-	27.367.384	8.847.721	434.998.651	5.383.708	476.597.464
02 PSPA	-	-	-	-	55.988.237	-	55.988.237
Total	-	-	27.367.384	8.847.721	490.986.888	5.383.708	532.585.701

### 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017

Pada awal tahun 2017, Sekretariat Utama BPS telah menetapkan target yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan Sekretariat Utama BPS dalam memenuhi tugasnya di tahun 2017. Target tersebut dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Utama yang merupakan bentuk komitmen Sekretaris Utama kepada kepala BPS. Perjanjian Kinerja untuk Sekretariat Utama dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama BPS selepas

DIPA anggaran 2017 ditetapkan. Berikut tabel penetapan kinerja Sekretariat Utama BPS tahun 2017 untuk masing-masing indikator sasaran.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan 1. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel</b>	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
1.1 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Poin	78,00
	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Poin	76,00
1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	75,00
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100,00
1.4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	5.800
	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	Persen	98,00
	Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	Persen	91,09
	Persentase Pegawai Yang Memenuhi Standar Kompetensi Tertentu	Persen	70,00

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Persentase Kementrian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer	Persen	70,00
	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementrian/Lembaga	Persen	30,00
1.5. Meningkatnya Layanan Perkantoran	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan	Persen	80,00
<b>Tujuan 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana BPS</b>	<b>Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>
2.1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80,00
	Kepuasan Pegawai Terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	100,00
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00



BAB III  
AKUNTABILITAS  
KINERJA



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

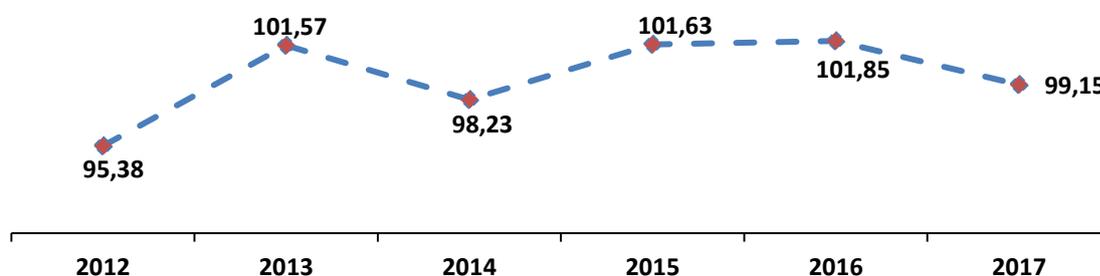
#### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja Sekretariat Utama BPS (Sestama) 2017 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2017. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2017 dan data realisasinya dapat diperoleh.

**Tabel 4. Rata-rata Capaian Kinerja Sestama Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis  
Tahun 2017**

Tujuan/Sasaran/Indikator	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)
<b>1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</b>	1	100,00
1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	2	98,84
1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	1	100,00
1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	2	100,00
1.4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	6	95,74
1.5. Meningkatnya Layanan Perkantoran	1	100
<b>2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS</b>	1	117,33
2.1. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	3	105,15
<b>Rata Rata Tujuan</b>		<b>108,66</b>
<b>Rata Rata Sasaran</b>		<b>99,17</b>

Secara umum, kinerja Sestama Tahun 2017, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan periode Renstra Sestama 2015-2019 bisa dikatakan cukup berhasil dengan rata-rata pencapaian tujuan sebesar 108,66% sedangkan rata-rata sasaran strategis mencapai 99,17%. Jika dilihat perkembangan capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan, pada tahun 2017 terjadi penurunan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 capaian kinerja sasaran strategis sebesar 98,23 persen, naik di tahun 2015 menjadi 101,63 persen, dan meningkat lagi menjadi 101,85 persen di tahun 2016, namun turun menjadi 99,15 persen di tahun 2017.



**Gambar 6. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2012 – 2017**

### Tujuan 1. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya sebagaimana yang tertera pada Tujuan 4 Renstra BPS 2015-2019. Dalam pelaksanaannya tujuan BPS tersebut diturunkan pada dua Unit Kerja eselon I yaitu Sestama dan Inspektorat Utama. Pada Sestama Tujuan BPS tersebut dinyatakan dalam tujuan pertama dokumen PK Sestama tahun 2017.

Akuntabilitas yang dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas,

diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setiap Tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK BPS tersebut berdasarkan:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- Efektivitas sistem pengendalian intern; dan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

**Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan Pertama Sekretariat Utama: Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel Tahun 2017**

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Realisasi 2016	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</b>					
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	100,00	WDP	10,00
<b>1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>					
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	78,00	74,96	96,10	74,72	0,32
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	76,00	77,20	101,58	75,95	1,65
<b>Rata Rata Sasaran</b>	<b>98,84</b>				
<b>1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan</b>					
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	100,00	WDP	10,00
<b>Rata Rata Sasaran</b>	<b>100,00</b>				

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Realisasi 2016	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif</b>					
Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	75,00	75,00	100,00	114,00	-34,21
Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.	100,00	100,00	100,00	100,00	-
<b>Rata Rata Sasaran</b>	<b>100,00</b>				
<b>1.4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik</b>					
Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	6000	5773	96,22	5546	4,09
Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	98,00	98,00	100,00	98,00	0
Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	91,09	95,00	104,29	105,79	-10,19
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	70,00	75,43	107,76	-	-
Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	70,00	58,00	82,86	-	-

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Realisasi 2016	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	30,00	25,00	83,33	-	-
<b>Rata Rata Sasaran</b>	<b>95,74</b>				
<b>1.5. Meningkatnya Layanan Perkantoran</b>					
Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	80,00	80,00	100,00	70,00	14,29
<b>Rata Rata Sasaran</b>	<b>100,00</b>				

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan BPS memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap akuntabilitas keuangan BPS pada tahun 2016. Hasil penilaian yang diserahkan pada tahun 2017 ini memperbaiki penilaian capaian BPS dibanding tahun 2016, karena pada tahun 2016 (yang merupakan penilaian tahun 2015) hasil pemeriksaan BPS terhadap laporan keuangan BPS memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perkembangan predikat akuntabilitas keuangan BPS dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 7. Predikat Akuntabilitas Keuangan BPS Tahun 2012 – 2016

### SS1.1 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Sebagaimana tujuan pertama dari IKU Sestama, sasaran strategis “**Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS**” merupakan hasil *cascading* dari Sasaran Strategis yang sama pada Dokumen PK BPS Tahun 2017. Meskipun memiliki deskripsi sasaran yang sama, namun tidak semua indikator di dalamnya diturunkan menjadi tanggung jawab Sestama. Dari tiga indikator yang menjadi ukuran keberhasilan sasara BPS tersebut, dua diantaranya menjadi tanggung jawab Sestama yaitu : Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB” dan “Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB”

Telah dijelaskan di atas, bahwa bukan hanya akuntabilitas keuangan saja yang perlu diperhatikan, melainkan juga akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja paling tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik oleh pemerintah, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja maka BPS diharapkan telah memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPS.

### **Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB**

BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di pusat maupun di daerah. Pada tahun 2017 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 74,96 atas pelaksanaan SAKIP BPS. Hasil penilaian tersebut lebih kecil dari target 2017 yang sebesar 78,00 point atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 96,10 persen. Meskipun tidak mencapai target, jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2016, capaian kinerja indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen.

Rekomendasi diberikan oleh KemenPAN dan RB untuk pelaksanaan AKIP di tahun selanjutnya antara lain:

- (1) Melakukan reviu kembali dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) termasuk indikator kerjanya;
- (2) Menyempurnakan indikator kinerja secara berjenjang yang ada di Renstra sampai level individu;
- (3) Melakukan analisis kemampuan sumber daya dikaitkan dengan *output/outcome* yang akan dihasilkan;
- (4) Meningkatkan budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai serta mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja berkelanjutan.

### **Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB**

Kegiatan pada masing-masing area perubahan RB BPS melekat pada *subject matter* dan unit kerja pendukung terkait, misalnya evaluasi harmonisasi peraturan perundang-undangan secara berkala yang dilakukan oleh Biro Humas dan Hukum, pembangunan sistem dan uji coba SKP *online* pada Area Perubahan Penataan Tatalaksana dengan melibatkan Biro Bina Program, Biro Kepegawaian dan Direktorat Neraca Produksi sebagai penanggungjawab, pengembangan SDM berbasis kompetensi oleh Biro Kepegawaian, implementasi SPIP oleh Inspektorat, peningkatan pelayanan

publik oleh Direktorat Diseminasi Statistik, dan Reviu Renstra BPS 2015-2019 oleh Biro Bina Program.

Pada tahun 2017 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 77,20 atas pelaksanaan RB BPS. Hasil penilaian ini lebih besar dari target 2017 yang sebesar 76,00 point atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 101,58 persen. Jika dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2016, capaian kinerja indikator ini mengalami kenaikan sebesar 1,65 persen.

Rekomendasi yang diberikan oleh KemenPAN dan RB untuk pelaksanaan RB di tahun selanjutnya antara lain:

- (1) Mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai;
- (2) Melakukan reviu terhadap kinerja pada level BPS, unit kerja eselon I dan BPS Daerah;
- (3) Mendorong implementasi reformasi birokrasi mulai dari BPS Pusat hingga ke unit kerja daerah;
- (4) Meningkatkan internalisasi kepada seluruh pegawai tentang segala kebijakan terbaru serta mendorong setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching dan konseling;
- (5) Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* terutama dalam rangka menginformasikan segala inovasi yang telah dilakukan oleh BPS;
- (6) Mereplikasi inovasi tata kelola internal organisasi yang dibuat oleh perwakilan BPS daerah agar dapat diimplementasikan di BPS daerah lainnya;
- (7) Meningkatkan internalisasi di lingkungan BPS dan melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan.

### **SS1.2 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan**

Penjelasan untuk sasaran ini dapat dilihat pada penjelasan tujuan 1. mengingat indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran ini sama dengan indikator yang digunakan pada tujuan 1.

### **SS1.3 Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif**

Sasaran Strategis ini bukan merupakan *hasil cascading* dari IKU BPS melainkan merupakan Sasaran strategis terkait dari Tugas dan Fungsi Sestama yang kinerjanya diukur melalui dua indikator pada pelaksanaannya diturunkan kepada Biro Humas dan Hukum. Ada dua indikator untuk mengukur sasaran ini, yaitu tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi dan persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS. Sasaran pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif bisa dikatakan sudah tercapai dengan rata-rata capaian kinerja indikatornya mencapai 100 persen. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 capaian kinerja indikator Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi mengalami penurunan sebesar 34,21

### **SS1.4 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik**

#### **Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga**

Dari target sebanyak 6000 orang pada PK 2017, realisasi indikator ini mencapai 5773 orang, hal ini menunjukkan capaian yang cukup memuaskan sebesar 96,22 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang hanya mencapai 5546 orang, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan sebesar 4,09 persen.

#### **Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu**

Dari target sebesar 98 persen pada PK 2017, realisasi indikator ini pada tahun 2017 mencapai 98 persen, hal ini menunjukkan capaian yang memuaskan sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang juga mencapai 98 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator ini tidak mengalami peningkatan, namun sudah menunjukkan hasil capaian yang maksimal yaitu 100 persen.

### **Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik**

Dari target sebesar 91,09 persen pada PK 2017, realisasi indikator ini mencapai 95 persen, hal ini menunjukkan capaian yang melebihi target yang diperkirakan yaitu sebesar 104,29. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang mencapai 105,79 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan sebesar 10,19 persen.

### **Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu**

Dari target sebanyak 70 persen pada PK 2017, realisasi indikator ini mencapai 75,43 persen, hal ini menunjukkan capaian yang melebihi target yaitu sebesar 107,76 persen. Capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, karena pada tahun 2016 belum mengalami perubahan IKU.

### **Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer**

Dari target sebanyak 70 persen pada PK 2017, realisasi indikator ini hanya mencapai 58 persen, sehingga capaian kinerja indikator ini hanya sebesar 82,86 persen. Capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, karena pada tahun 2016 belum mengalami perubahan IKU.

### **Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga**

Dari target sebanyak 30 persen pada PK 2017, realisasi indikator ini mencapai 25 persen, sehingga capaian kinerja indikator ini hanya sebesar 83,33 persen. Capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, karena pada tahun 2016 belum mengalami perubahan IKU.

#### **SS1.4 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik**

Pada sasaran strategis ini, hanya terdapat satu indikator yaitu persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan. Dengan target PK tahun 2017 sebesar 80 persen, realisasi yang berhasil dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 80 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 70 persen, dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan sebesar 14,29 persen.

---

### **Tujuan 2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS**

---

Tujuan kedua adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Badan Pusat Statistik. Indikator dari tujuan kedua ini ingin melihat berapa persen pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS. Jika dilihat dari realisasi pada tahun 2017 sebesar 93,86 persen pengguna layanan merasa puas dengan pemenuhan sarana dan prasarana di BPS. Hal ini memperlihatkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana di BPS sudah cukup baik. Jika dibandingkan dengan target PK 2017 yang hanya sebesar 80 persen, maka capaian kinerja pada indikator tujuan ini sebesar 117,33 persen. Dibandingkan pula dengan realisasi di tahun 2016, realisasi di tahun 2017 meningkat sebesar 7,45 persen.

#### **SS2.1 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS**

##### **Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS**

Penjelasan untuk indikator ini dapat dilihat pada penjelasan tujuan 2. Mengingat indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan indikator ini sama dengan indikator yang digunakan pada tujuan 2.

### **Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS**

Untuk melihat keberhasilan tercapainya tujuan 2, tidak hanya melihat dari segi kepuasan pengguna layanan, namun kualitas sarana dan prasarana BPS juga dapat dilihat dari kepuasan pengguna terhadap kualitas sarana dan prasarana di lingkungan BPS. Pengguna dalam lingkungan BPS ini berarti seluruh pegawai BPS, yang mana tingkat kepuasannya terhadap kualitas sarana dan prasarana BPS pada tahun 2017 sebesar 100 persen. Hal ini berarti seluruh pegawai BPS menyatakan puas terhadap kualitas sarana dan prasarana BPS. Realisasi sebesar 100 persen ini sebanding dengan target yang tercantum di PK 2017 sebesar 100 persen.

### **Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan**

Indikator sasaran berikutnya berupa persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan. Jika melihat realisasi tahun 2017, pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang terselesaikan sebesar 98,13 persen. Jika dilihat dari target yang tertuang di PK 2017 sebesar 100 persen, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini sebesar 98,13 persen.

## **3.2 Capaian kinerja Tahun 2017 terhadap Target Renstra 2017 dan 2019**

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

**Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sestama BPS Tahun 2017 dengan Target Renstra Tahun 2017 dan 2019**

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2017	Capaian Thd Target (%)	
	2017	2019		2017	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</b>					
1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
<b>SS1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>					
1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	78,00	84,00	74,96	96,10	89,24
2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	75,00	79,00	77,20	102,93	97,72
<b>SS1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan</b>					
1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
<b>SS1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif</b>					
1. Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00
2. Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.	100,00	95,00	100,00	100,00	105,26

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2017	Capaian Thd Target (%)	
	2017	2019		2017	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## SS1.4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5672	8963	5773	101,78	64,41
2. Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	98,00	99,00	98,00	100,00	98,99
3. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	-	-	95,00	-	-
4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	-	-	75,43	-	-
5. Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	-	-	58,00	-	-
6. Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	-	-	25,00	-	-

## SS1.5. Meningkatnya Layanan Perkantoran

1. Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	80,00	71,00	80,00	100,00	112,68
---	-------	-------	-------	--------	--------

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2017	Capaian Thd Target (%)	
	2017	2019		2017	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS</b>					
1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	80,00	65,00	93,86	117,33	144,40
<b>SS2.1. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS</b>					
1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	80,00	65,00	93,86	117,33	144,40
2. Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	-	-	100,00	-	-
3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100,00	100,00	98,13	98,13	98,13

Jika dibandingkan realisasi tahun 2017 terhadap target Renstra 2017, capaian kinerja seluruh indikator yang mewakili kinerja Sestama BPS untuk Periode Renstra 2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator yang realisasi kinerjanya telah melampaui target Renstra 2017 sebanyak tiga indikator yaitu: (1) Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB, (2) Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga, (3) Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.

Indikator yang realisasi kinerjanya belum melampaui target Renstra di tahun 2017 sebanyak dua indikator indikator yaitu : (1) Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB, (2) Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017 Sestama BPS menerima pagu sebesar Rp 532,59 miliar yang dengan komposisi terdiri dari 261 miliar belanja operasional dan 270,72 miliar belanja non operasional. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sestama BPS menggunakan anggaran sebesar Rp 485,31 miliar dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 242,87 miliar dan belanja non operasional sebesar 242,44 miliar. Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, realisasi anggaran Sestama BPS pada tahun 2017 mencapai 91,13 persen dengan rincian belanja operasional sebesar 92,75 persen dan belanja non operasional sebesar 89,55 persen.

**Tabel 7. Realisasi Pagu Sekretariat Utama menurut jenis Belanja TA 2017 (Miliar Rupiah)**

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Realisasi /Pagu (%)
(1)	(2)	(5)	(6)
Operasional	261,86	242,87	92,75
Non Operasional	270,72	242,44	89,55
<b>Total</b>	532,59	485,31	91,13

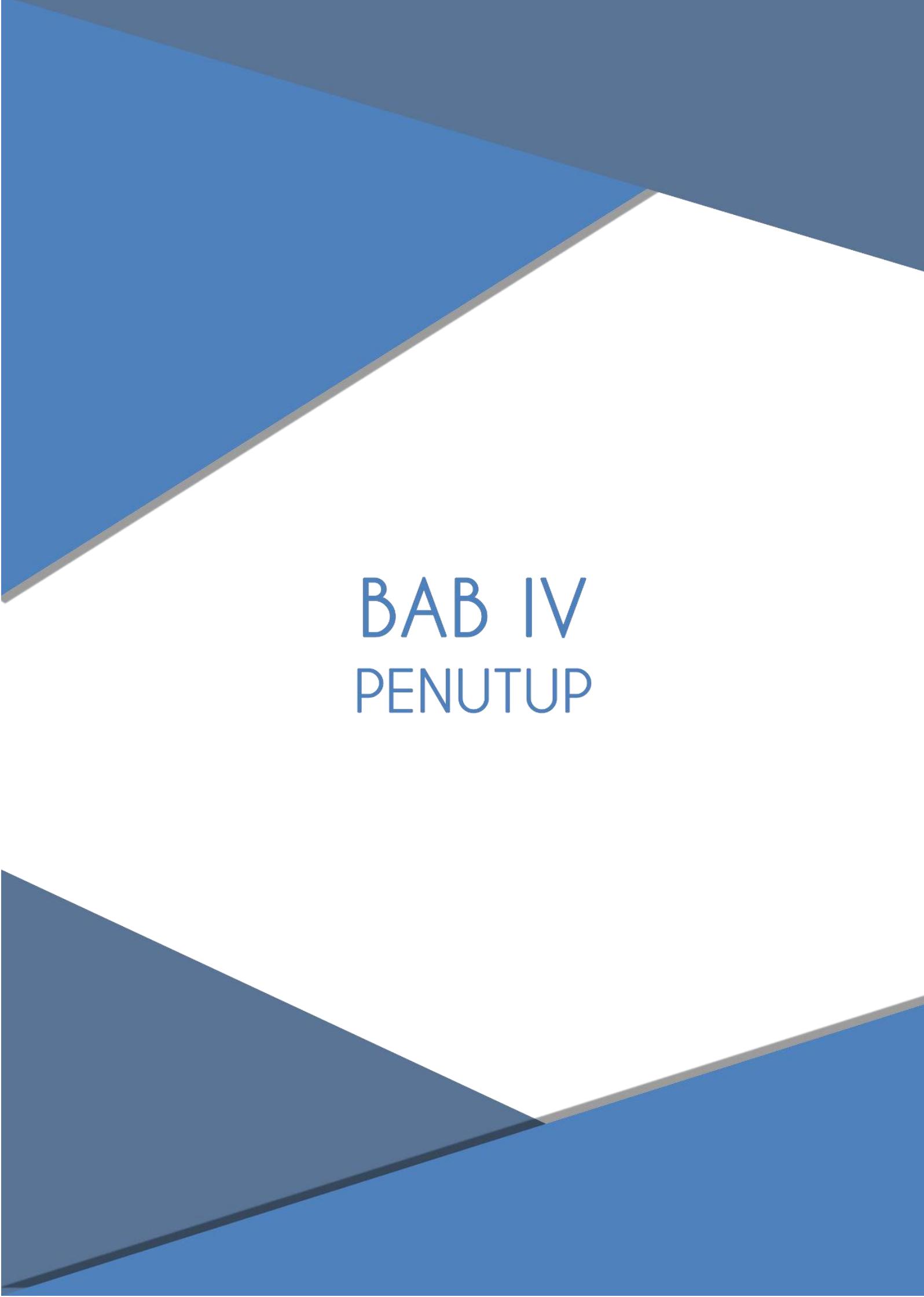
Jika dirinci menurut sumber dana, persentase realisasi anggaran yang berasal dari sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) menjadi yang terbesar yaitu 100,00 persen. Selanjutnya berturut-turut adalah Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar 95,17 persen, Rupiah Murni (RM) sebesar 91,03 persen. Terakhir, realisasi anggaran dari sumber dana Penerimaan Non Pajak (PNP) menjadi yang terkecil yaitu sebesar 66,33 persen. Sebagai tambahan informasi, anggaran yang bersumber dari RMP dan PLN sepenuhnya digunakan

untuk mendukung Program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP CERDAS).

**Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2017 (Miliar Rupiah)**

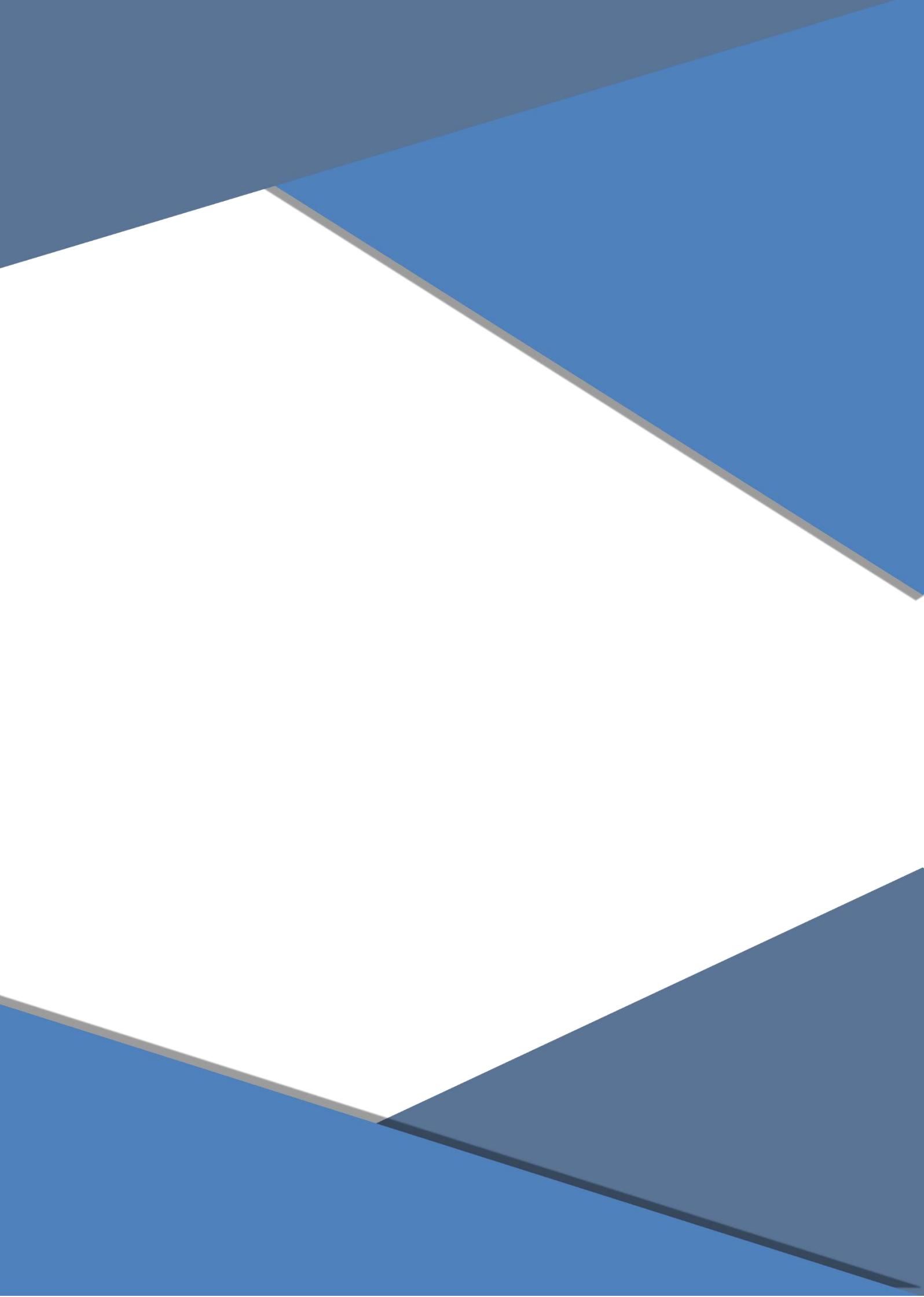
Program/ Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(6)
<b>01 DMPTTL</b>	476,60	430,34	90,29
PLN	27,37	27,37	100,00
PNP	8,85	5,87	66,33
RM	435,00	391,98	90,11
RMP	5,38	5,12	95,17
<b>02 PSPA</b>	55,99	54,97	98,18
RM	55,99	54,97	98,18
<b>TOTAL</b>	532,59	485,31	91,12
PLN	27,37	27,37	100,00
PNP	8,85	5,87	66,33
RM	490,99	446,95	91,03
RMP	5,38	5,12	95,17





# BAB IV

## PENUTUP



## BAB IV

### PENUTUP

**K**inerja Sestama BPS pada tahun 2017 dapat dikatakan memuaskan dengan capai kinerja tujuan sebesar 108,66 persen dan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 99,17. Jika dilihat perkembangannya terhadap target kinerja sasaran strategis setiap tahunnya memang capaian kinerja sasaran strategis di tahun 2017 mengalami penurunan namun tidak signifikan. Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Selain itu pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya juga harus ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja antara lain :

#### **Penajaman IKU**

Agar pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran Sestama BPS menjadi lebih relevan, perlu dilakukan penajaman terhadap beberapa IKU. Penajaman IKU bukanlah hal yang mudah mengingat penajaman memerlukan kesiapan, baik dari sisi SDM maupun anggaran yang harus dipenuhi agar IKU yang telah disusun bukan saja dapat diukur tetapi juga dapat dicapai keberhasilannya.

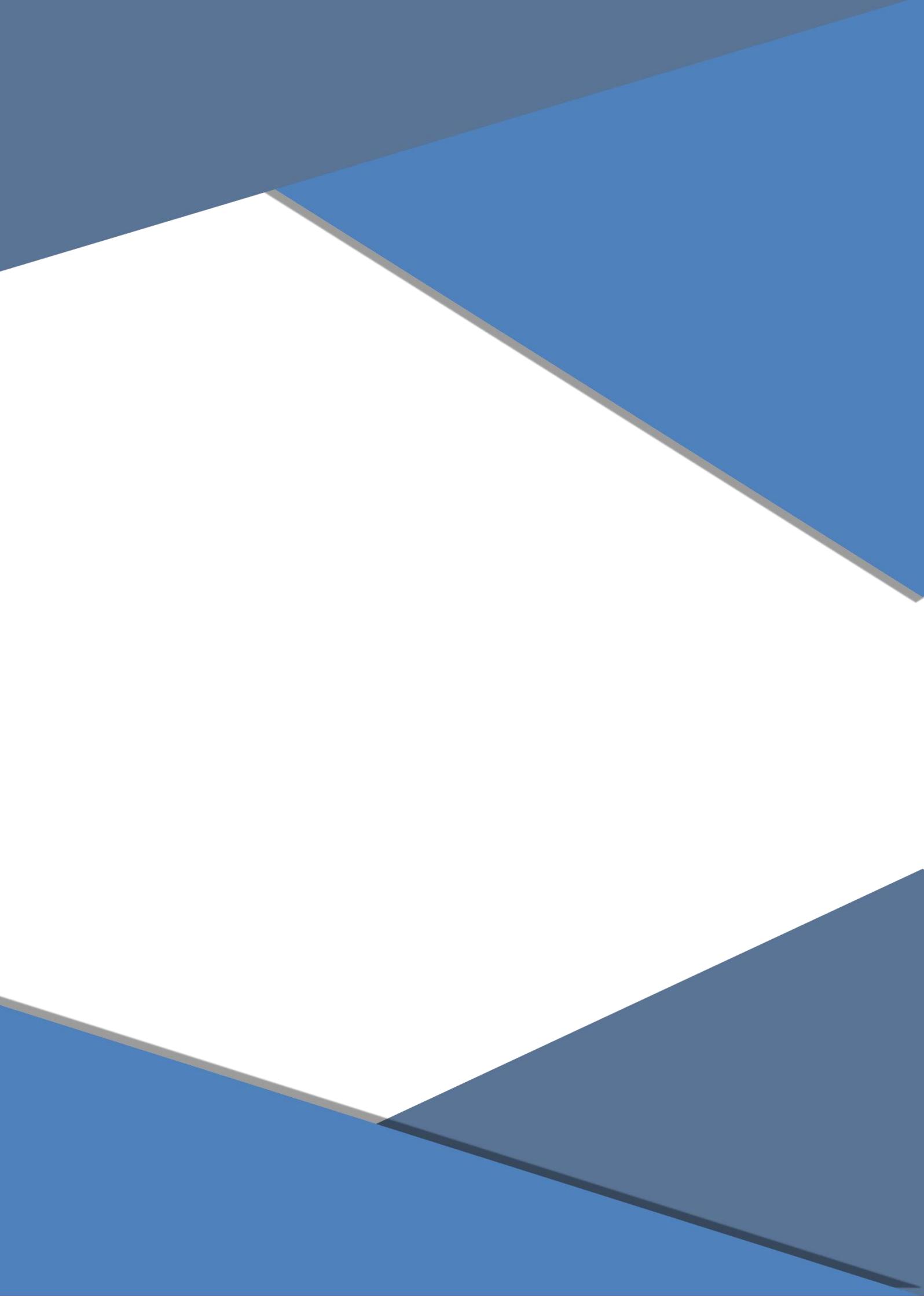
Beberapa indikator sasaran yang perlu dipertajam terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan dalam pengukuran pembinaan SDM perlu dipertajam. Pembinaan perlu dilakukan secara terus menerus agar SDM BPS tetap memenuhi standar kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membina jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer, kinerja BPS

dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan tersebut di seluruh instansi pemerintah juga harus terukur.

### **Penajaman Target Kinerja**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa indikator realisasinya jauh melampaui target akhir Renstra 2015-2019. Agar kinerja Sestama BPS terus meningkat, maka perlu dilakukan penajaman (peningkatan) terhadap target kinerja pada beberapa indikator. Penajaman diharapkan menjadi pendorong bagi BPS untuk berkinerja jauh lebih baik.

# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BPS  
TAHUN 2015-2019

Instansi	:	Sekretariat Utama
Visi	:	Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Administrasi yang efektif, efisien, terpadu dan berkualitas
Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi dan layanan administrasi yang prima, berkualitas, efektif, dan efisien bagi pemanfaat layanan dan <i>stakeholder</i>;</li> <li>2. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan administrasi dalam kerangka pelaporan yang andal, efektif, dan efisien; dan</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir dan sistem administrasi yang berlaku.</li> </ol>

Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN &amp; RB</li> <li>1.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN &amp; RB</li> </ol>	Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja	Program DMTTTL dan PPAA
	2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Program DMPTTL

Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi</li> <li>2. Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS</li> </ol>	Meningkatkan kegiatan sosialisasi eksternal di bidang statistic dan koordinasi penyusunan produk hukum	Program DMPTTL
	4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga</li> <li>2. Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu</li> <li>3. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik</li> <li>4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu</li> <li>5. Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer</li> <li>5. Persentase terpenuhinya</li> </ol>	Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja	Program DMPTTL

Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lem baga		
	5. Meningkatnya Layanan Perkantoran	1. Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan	Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia	Program DMPTTL
2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	1. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 2. Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS 3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Program PSPA



## LAMPIRAN 2

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.  
Jabatan : Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Suhariyanto  
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Suhariyanto  
NIP. 19610615 198312 1 001

Jakarta, 27 Maret 2017

Pihak Pertama

Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.  
NIP. 19570923 198003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
SEKRETARIAT UTAMA

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Point	78,00
	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Point	76,00
Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	75,00
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100,00
Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	5.800
	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	Persen	98,00
	Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	Persen	91,09
	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	Persen	70,00
	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	Persen	70,00
	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan	Persen	30,00

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017

\*\*\*

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pranata Komputer Kementerian/Lembaga		
Meningkatnya Layanan Perkantoran	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	Persen	80,00
Tujuan 2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80,00
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80,00
	Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	100,00
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00

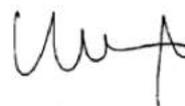
Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 715.148.055.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 57.881.395.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 773.029.450.000,-</b>

Pihak Kedua



Dr. Suharivanto  
NIP. 19610615 198312 1 001

Jakarta, 27 Maret 2017  
Pihak Pertama



Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.  
NIP. 19570923 198003 1 003



## LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPS  
TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	Trw I	0	WTP	0,00
			Trw II	WTP	WTP	100,00
			Trw III	WTP	WTP	100,00
			Trw IV	WTP	WTP	100,00
1.1 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Poin	Trw I	0,00	0,00	0,00
			Trw II	0,00	0,00	0,00
			Trw III	0,00	0,00	0,00
			Trw IV	78,00	74,96	96,10
	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Poin	Trw I	0,00	0,00	0,00
			Trw II	0,00	0,00	0,00
			Trw III	0,00	0,00	0,00
			Trw IV	76,00	77,20	101,57
1.2 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	Trw I	0,00	WTP	0,00
			Trw II	WTP	WTP	100,00
			Trw III	WTP	WTP	100,00
			Trw IV	WTP	WTP	100,00
1.3 Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	Trw I	75,00	0,00	0,00
			Trw II	75,00	70,00	93,33
			Trw III	75,00	75,00	100,00
			Trw IV	75,00	75,00	100,00
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	Trw I	100,00	100,00	100,00
			Trw II	100,00	100,00	100,00
			Trw III	100,00	100,00	100,00
			Trw IV	100,00	100,00	100,00
1.4 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam	Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	Trw I	5600	5055	90,27
			Trw II	5675	5331	93,94
			Trw III	5825	5649	96,98
			Trw IV	6000	5773	96,22
		Persen	Trw I	0,00	0,00	0,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
penyelenggaraan kegiatan statistik	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu		Trw II	0,00	0,00	0,00
			Trw III	0,00	0,00	0,00
			Trw IV	98,00	98,00	100,00
	Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	Persen	Trw I	18,41	19,38	105,26
			Trw II	89,30	89,57	100,30
			Trw III	89,70	95,25	106,19
			Trw IV	91,09	95,00	104,29
	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	persen	Trw I	0,00	4,10	0,00
			Trw II	0,00	70,00	0,00
			Trw III	70,00	70,00	100,00
			Trw IV	70,00	75,43	107,76
	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	Persen	Trw I	45,00	48,00	106,67
			Trw II	50,00	51,00	102,00
			Trw III	60,00	54,00	90,00
			Trw IV	70,00	58,00	82,86
	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	Persen	Trw I	15,00	18,00	120,00
Trw II			20,00	20,00	100,00	
Trw III			25,00	21,00	84,00	
Trw IV			30,00	25,00	83,33	
1.5 Meningkatnya Layanan Perkantoran	Persen	Trw I	20,00	20,00	100,00	
		Trw II	30,00	30,00	100,00	
		Trw III	50,00	50,00	100,00	
		Trw IV	80,00	80,00	100,00	
Tujuan 2.: Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persen	Trw I	0,00	0,00	0,00	
		Trw II	0,00	0,00	0,00	
		Trw III	0,00	0,00	0,00	
		Trw IV	80,00	93,86	117,33	
2.1 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persen	Trw I	0,00	0,00	0,00	
		Trw II	0,00	0,00	0,00	
		Trw III	0,00	0,00	0,00	
		Trw IV	80,00	93,86	117,33	
	Persen	Trw I	0,00	0,00	0,00	
		Trw II	0,00	0,00	0,00	
		Trw III	0,00	0,00	0,00	
		Trw IV	100,00	100,00	100,00	
	Peserta	Trw I	25,00	20,36	81,44	

## Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017

\*\*\*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan		Trw II	50,00	26,29	52,58
			Trw III	75,00	50,10	66,80
			Trw IV	100,00	98,13	98,13



## LAMPIRAN 4

Jumlah Pejabat Fungsional pada Badan Pusat Statistik  
Keadaan: Akhir Tahun 2017

Jabatan Fungsional	Keterampilan					Ahli					Total
	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia	Sub Total	Pertama	Muda	Madya	Utama	Sub Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Analisis Kepegawaian	-	-	4	2	6	13	13	2		28	34
Arsiparis	-	4	3	-	7	-	-	-		-	7
Auditor	-	-	2	-	2	21	16	2	-	39	41
Dokter								1	-	2	-
Dokter Gigi								-	1	-	-
Dosen *								21	18	14	
Peneliti								-	1	2	1
Penerjemah								-	1	-	-
Penyuluh Hukum								12	1	-	-
Perawat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Perawat Gigi	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Perencana								-	-	-	-
Pranata Humas	-	-	-	1	1	-	1	-		1	2
Pranata Komputer	1	5	7	6	19	24	27	-	-	51	70
Pustakawan	-	-	2	-	2	-	2	-	-	2	4
Statistisi		704	702	638	2.044	896	497	23	1	1.417	3.461
Widyaiswara								-	11	10	-
Jumlah	1	713	720	648	2.082	988	590	55	2	1.635	3.717

\*) Nama Jabatan Dosen :

- Pertama : Asisten Ahli
- Muda : Lektor
- Madya : Lektor Kepala



## LAMPIRAN 5

## Jumlah Pegawai BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2017

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pusat</b>					
Sekretariat Utama	20	437	692	281	1.430
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	2	32	21	19	74
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	15	69	13	16	113
<b>Daerah*</b>					
BPS Provinsi Aceh	1	26	305	204	536
BPS Provinsi Sumatera Utara	2	116	357	304	779
BPS Provinsi Sumatera Barat	3	52	226	155	436
BPS Provinsi Riau	-	40	183	142	365
BPS Provinsi Jambi	-	41	138	123	302
BPS Provinsi Sumatera Selatan	-	62	232	135	429
BPS Provinsi Bengkulu	-	40	151	59	250
BPS Provinsi Lampung	-	47	202	177	426
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	19	114	48	181
BPS Provinsi Kepulauan Riau	-	23	110	66	199
BPS Provinsi DKI Jakarta	-	42	91	88	221
BPS Provinsi Jawa Barat	-	100	446	461	1.007
BPS Provinsi Jawa Tengah	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
BPS Provinsi D I Yogyakarta	250	250	250	250	250
BPS Provinsi Jawa Timur	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
BPS Provinsi Banten	317	317	317	317	317
BPS Provinsi Bali	250	250	250	250	250
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	331	331	331	331	331
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	558	558	558	558	558
BPS Provinsi Kalimantan Barat	389	389	389	389	389
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	359	359	359	359	359
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	402	402	402	402	402
BPS Provinsi Kalimantan Timur	396	396	396	396	396
BPS Provinsi Sulawesi Utara	346	346	346	346	346
BPS Provinsi Sulawesi Tengah	348	348	348	348	348
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	669	669	669	669	669

## Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017

\*\*\*

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	426	426	426	426	426
BPS Provinsi Gorontalo	204	204	204	204	204
BPS Provinsi Sulawesi Barat	204	204	204	204	204
BPS Provinsi Maluku	289	289	289	289	289
BPS Provinsi Maluku Utara	256	256	256	256	256
BPS Provinsi Papua Barat	270	270	270	270	270
BPS Provinsi Papua	-	20	328	145	493
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>2.141</b>	<b>8.225</b>	<b>5.532</b>	<b>15.948</b>

\* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

## LAMPIRAN 6

SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT UTAMA BPS  
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Unit Kerja	Jenjang Pendidikan					
	s.d SMA	D-III	S1	S2	S3	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000 Sekretaris Utama	-	-	-	-	1	1
2100 Biro Bina Program	3	1	24	23	-	51
2200 Biro Keuangan	15	11	29	17	-	72
2300 Biro kepegawaian	8	2	35	17	-	62
2400 Biro Humas dan Hukum	14	7	35	13	-	69
2500 Biro Umum	68	9	33	8	-	118
2600 Pusat Pendidikan dan Pelatihan	14	5	21	32	2	74
2700 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	15	1	13	69	15	113
Total	137	36	190	179	18	560